

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Dlanggu memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja perubahan yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;

2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kedefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Renja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.
- Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab V P E N U T U P

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.”

Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Dlanggu pada tahun 2019 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 96 % sebagai berikut :

Anggaran APBD	Rp. 524.239.480
Realisasi	<u>Rp. 505.874.859</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 18.364.621</u>

Realisasi program dan kegiatan tahun 2019 Perangkat Daerah Kecamatan Dlanggu diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Realisasi belanja pada Kecamatan Dlanggu Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.480.000	17.624.019	75	5.855.981
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000	1500.000	100	0
	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000	22.000.000	100	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	6.000.000	100	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	7.000.000	100	0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.600.000	56.420.000	99	180.000
	Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000	89.700.000	99	300.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	28.205.000	25.600.000	91	2.605.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	13.404.480	13.404.480	100	0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	26.346.000	88	3.654.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000	25.000.000	100	0
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100	0
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	14.500.000	14.290.000	99	210.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja PERANGKAT DAERAH	11.000.000	9.600.000	87	1.400.000

	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	36.000.000	33.350.000	93	2.650.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	41.550.000	41.540.960	100	9.040
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	36.000.000	36.000.000	100	0
	Perlombaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	27.000.000	27.000.000	100	0
	Program Pelayanan Kecamatan				
	Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	45.000.000	43.499.400	97	1.500.600
	JUMLAH	524.239.480	505.874.859	96	18.364.621

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Dlanggu

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (lihat di per ubahan renstra)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2020							
					Target Renja Perangkat Daerah sd 2019	Realisas i Renja Perangk at Daerah 2019	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
	Urusan Wajib Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Adm. Keuda, Perangkat daerah, Kepegawaian															
	Bidang Urusan Keuangan Daerah															
4	01	4	01	20	06											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
4	01	4	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	50 dokumen	20 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	40 Dokumen	80%
1	05	4	01	20	16		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan									

							Lingkungan									
1	05	4	01	20	16	25	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	Jumlah waktu penanganan konflik sosial dalam setahun	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
2	07	4	01	20	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
2	07	4	01	20	15	01	Pemberdayaan Lembaga & Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah rapat pleno dan pembinaan yang dapat dilaksanakan dalam setahun	60 rapat	24 rapat	12 rapat	12 rapat	100%	12 rapat	48 rapat	80%
2	07	4	01	20	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis & Masyarakat	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dapat dilaksanakan dalam setahun	20 pelatihan/so sialisasi	8 pelatihan/so sialisasi	4 pelatihan/s osialisasi	4 pelatihan /sosialis asi	100%	4 pelatihan/sosiali sasi	16 pelatihan/sosia lisasi	80%
2	07	4	01	20	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
2	07	4	01	20	16	08	Perlombaan Kegiatan Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam setahun	15 lomba	6 lomba	3 lomba	3 lomba	100%	3 lomba	12 lomba	80%
4	01	4	01	20	55		Program Pelayanan Kecamatan									
4	01	4	01	20	55	01	Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah waktu terselenggaranya PATEN secara prima dalam setahun	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	66%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dlanggu

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Angka Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standar pelayanan
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (Tabel TC. 30 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/s tandar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase cakupan pelayanan umum dan perijinan			69%	68%	70%				NA	68%	70%				
2	Persentase peningkatan intensifikasi PBB			1,6%	2%	2%	1%	1%	1%				1%			
3	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standar pelayanan						75%	79%	81%				75%	79%	81%	
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat						75%	79%	81%				75%	79%	81%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Dlanggu tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dlanggu antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Belum memadainya kompetensi beberapa SDM yang ada;
3. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi;
4. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas;
5. Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah dan yang tidak berhubungan dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Dlanggu terhadap perwujudan pencapaian visi dan misi daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Selengkapnya sebagaimana Table 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (Tabel TC. 31 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kecamatan Dlanggu

Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Layanan Kesekretariatan	Kecamatan Dlanggu	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	348.404.480	Program Layanan Kesekretariatan	Kecamatan Dlanggu	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%	348.404.480	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%		
			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	76%				Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	76%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	71,07%				Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	71,07%		Indikator Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Jumlah Dokumen	15 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Jumlah Dokumen	15 Dokumen	25.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan		Jumlah Laporan	12 Laporan	45.000.000	Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan		Jumlah Laporan	12 Laporan	45.000.000	
	Ketatausahaan dan Kepegawaian Kecamatan		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	14 Dokumen	278.404.480	Ketatausahaan dan Kepegawaian Kecamatan		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	14 Dokumen	278.404.480	

2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Dlanggu	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	281.000.000	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Dlanggu	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	281.000.000	
			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti dalam 1 tahun, bidang: - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat	81%				Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti dalam 1 tahun, bidang: - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat	81%		
	Penunjang PATEN		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai Standar Pelayanan	560 pelayanan	35.000.000	Penunjang PATEN		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai Standar Pelayanan	560 pelayanan	35.000.000	
	Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Desa		Jumlah Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3 pembinaan	30.000.000	Pembinaan Penyelenggara Pemerintahan Desa		Jumlah Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3 pembinaan	30.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan	3 Koordinasi	40.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan	3 Koordinasi	40.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat		Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	24 Kegiatan	131.000.000	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat		Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	24 Kegiatan	131.000.000	
	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	6 kegiatan	45.000.000	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	6 kegiatan	45.000.000	
			JUMLAH		529.404.480			JUMLAH		529.404.480	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, anara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.6

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2021
Kabupaten Mojokerto****Kecamatan Dlanggu**

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan				
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat				
	- (Pemberdayaan PKK)	Kecamatan Dlanggu	Kegiatan PKK	Rp.150.000.000	Usulan dari pembina PKK (ibu Bupati)
	- (Belanja hewan Qurban	Kecamatan Dlanggu	Hibah Hewan Qurban	Rp. 32.800.000	BPKA
	Jumlah			Rp. 182.800.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Dlanggu ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 5 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan OPD dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah *Meningkan kualitas pelayanan publik* sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 7 yaitu *memperkuat kondusifitas*

ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima disemua sector bagi masyarakat.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka pada tahun 2021 dilakukan revisi nama program dan kegiatan sesuai canscading kecamatan baru untuk perbaikan sistem akuntabilitas kinerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran strategis yang baru yaitu *Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan*

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto pada 2019 – 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NA	NA	NA	79	79	81
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	NA	NA	NA	75%	79%	81%
			Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : - Pemerintahan - Pembangunan - Perekonomian - Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kesejahteraan Sosial	NA	NA	NA	75%	79%	81%

3.3 Program dan Kegiatan.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Dlanggu yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Tahun 2021. Renja Kecamatan Dlanggu merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Dlanggu.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun program dan kegiatan dari Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Layanan Kesekretariatan Kecamatan, mencakup kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kecamatan;
 - b. Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan;
 - c. Ketatausahaan dan Kepegawaian Kecamatan.
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan, mencakup kegiatan:
 - a. Penunjang PATEN;
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan;
 - d. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 dapat di uraikan pada Tabel TC- 33

Tabel 3.2
(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Mojokerto

KODE SKPD		4.01.23								
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU								
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
				Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	6	9	8	10	11	12	13	14
1	4.01.4.01.17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	Kec. DLANGGU		394.404.480	APBD	-		394.404.480
			Persentase indikator program PD yang tercapai	Kec. DLANGGU	100%		-	-	100%	
			Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan DLANGGU	Kec. DLANGGU	90%		-	-	90%	
			Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan DLANGGU	Kec. DLANGGU	76		-	-	76	
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Kec. DLANGGU	81%	25.000.000	APBD	-	81%	25.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun		6 dokumen	10.000.000	APBD	-	6 dokumen	10.000.000

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun		8 dokumen	15.000.000	APBD	-	8 dokumen	15.000.000
2		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Kec. DLANGGU	13 dokumen	40.000.000	APBD	-	13 dokumen	40.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan	40.000.000	APBD	-	4 dokumen	40.000.000
3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah		100%	59.213.440	APBD	-	100%	59.213.440
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan		12 bulan	30.404.480	APBD	-	12 bulan	30.404.480
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional		2 unit	2.000.000	APBD	-	2 unit	2.000.000
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa tenag kerja selama 12 bulan		12 bulan	26.808.960	APBD	-	12 bulan	26.808.960
4		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Pemerintahan daerah		100%	187.191.040	APBD	-	100%	187.191.040

		Penyediaan bahan / material	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll		1 paket	22.000.000	APBD	-	1 paket	22.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		1 paket	10.191.040	APBD	-	1 paket	10.190.040
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll		1 paket	8.000.000	APBD	-	1 paket	8.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll		1 paket	97.000.000	APBD	-	1 paket	97.000.000
		Penyediaan logistik kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	30.000.000	APBD	-	12 bulan	30.000.000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan		12 bulan	20.000.000	APBD	-	12 bulan	20.000.000
5		Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Pemeliharaan barang milik daerah		81%	75.000.000	APBD	-	81%	75.000.000
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		2 unit	20.000.000	APBD	-	2 unit	20.000.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan		12 bulan	45.000.000	APBD	-	12 bulan	45.000.000

		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik		1 paket	10.000.000	APBD	-	1 paket	10.000.000
6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang disiplin	Kec. DLANGGU	81%	8.000.000	APBD	-	81%	8.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		20 stel	8.000.000	APBD	-	20 stel	8.000.000
2	4.01.4.01.56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. DLANGGU	81%	45.000.000	APBD	-	81%	45.000.000
1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu		560 pelayanan	45.080.000	APBD	-	285 dokumen	45.080.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelayanan perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan		30 pelayanan	10.000.000	APBD	-	30 pelayanan	10.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Pelayanan perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan		530 pelayanan	35.000.000	APBD	-	530 pelayanan	35.000.000
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan		81%	100.000.000	APBD	-	81%	100.000.000
1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		16 kegiatan	100.000.000	APBD	-	16 kegiatan	100.000.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		12 kegiatan	60.000.000	APBD	-	12 kegiatan	60.000.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat		4 pembinaan	40.000.000	APBD	-	4 pembinaan	40.000.000

4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum		81%	50.000.000	APBD	-	81%	50.000.000
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 kegiatan	50.000.000	APBD	-	4 kegiatan	50.000.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		2 kegiatan	40.000.000	APBD	-	2 kegiatan	40.000.000
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 kegiatan	10.000.000	APBD	-	2 kegiatan	10.000.000
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan		81%	40.000.000	APBD	-	81%	40.000.000
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pembangunan		81%			-	81%	
1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		16 fasilitasi	40.000.000	APBD	-	16 fasilitasi	40.000.000

		Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa		16 fasilitasi	5.000.000	APBD	-	16 fasilitasi	5.000.000
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		16 fasilitasi	9.000.000	APBD	-	16 fasilitasi	9.000.000
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		16 fasilitasi	6.000.000	APBD	-	16 fasilitasi	6.000.000
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		16 fasilitasi	5.000.000	APBD	-	16 fasilitasi	5.000.000
		Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		16 fasilitasi	15.000.000	APBD	-	16 fasilitasi	15.000.000
JUMLAH TOTAL						629.404.480	-	-	-	629.404.480

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja

organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tahun 2021, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021
KECAMATAN DLANGGU
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4.01.4.01.17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	-	B	-				Kec. Dlanggu	394.404.480	-	0	-	0	-
							Persentase indikator program PD yang tercapai	100%	Kec. Dlanggu		-	0	-	0	-
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1	B			Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	81%	Kec. Dlanggu	25.000.000	-	0	-	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				Jumlah dokumen yang dapat tersusun		6 dokumen		10.000.000	-	0	-	0	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah dokumen yang dapat tersusun		8 dokumen		15.000.000	-	0	-	0	-

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan Dlanggu	90%	Kec. Dlanggu		-	0	-	0	-
2		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2	B		Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu		13 dokumen	Kec. Dlanggu	40.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan		40.000.000	-	0	-	0	-
							Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Trowulan	76	Kec. Dlanggu		-	0	-	0	-
3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	100%		59.213.440	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan		12 bulan		30.404.480	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional		2 unit		2.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan		12 bulan		26.808.960	-	0	-	0	-

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll			24 jenis		22.000.000	-	0	-	0	-
4		Administrasi Umum Perangkat daerah				Persentase penyediaan Administrasi Umum Pemerintahan daerah		100%	Kec. Dlanggu	187.191.040	-	0	-	0	-
		Penyediaanbahan / material			Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll			1 paket		22.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy			1 paket		10.191.040	-	0	-	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll			1 paket		8.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll			1 paket		97.000.000	-	0	-	0	-

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan logistik kantor			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman			12 bulan		30.000.000	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan			12 bulan		20.000.000	-	0	-	0	-
5		Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah				Persentase penyediaan Pemeliharaan barang milik daerah		81%	Kec. Dlanggu	75.000.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik			2 unit		20.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan			Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan			12 bulan		45.000.000	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik			1 paket		10.000.000	-	0	-	0	-
6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	B		Persentase jumlah ASN yang disiplin		81%	Kec. Dlanggu	8.000.000	-	0	-	0	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya			Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi			20 stel		8.000.000	-	0	-	0	-

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	4.01. 4.01.56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	Kec. Dlanggu	45.000.000	-	0	-	0	-
1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu		560 Pelayanan		45.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan			Jumlah pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			30 pelayanan		10.000.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan			Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			530 pelayanan		35.000.000	-	0	-	0	-
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	81%		100.000.000	-	0	-	0	-
1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		16 kegiatan		100.000.000	-	0	-	0	-
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat			12 kegiatan		60.000.000	-	0	-	0	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat			4 pembinaan		40.000.000	-	0	-	0	-

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
4		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	81%	Kec. Dlanggu	50.000.000	-	0	-	0	-
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Jumlah Jenis Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 kegiatan	Kec. Dlanggu	50.000.000	-	0	-	0	-
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12 kegiatan		40.000.000	-	0	-	0	-
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			2 kegiatan		10.000.000	-	0	-	0	-
5		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	81%	Kec. Dlanggu	40.000.000	-	0	-	0	-

KODE SKPD		4.01.23													
NAMA SKPD		KECAMATAN DLANGGU													
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pembangunan	81%			-	0	-	0	-
1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		16 fasilitasi	Kec. Dlanggu	40.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa			Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa			16 fasilitasi		5.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			16 fasilitasi		9.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			16 fasilitasi		5.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			16 fasilitasi		5.000.000	-	0	-	0	-
		Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			16 fasilitasi		15.000.000	-	0	-	0	-
JUMLAH TOTAL										629.404.480	-	0	-	0	-

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Tahun 2021 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dlanggu, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Dlanggu, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan

Dlanggu Tahun 2021 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Rancangan Renja Kecamatan Dlanggu diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, Oktober 2020
CAMAT DLANGGU

NUNUK DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690701 198903 1 008